

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN

MUSLAEDI

A011181018



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

MUSLAEDI

A011181018



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

MUSLAEDI
A011181018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 September 2022

Pembimbing I

Fitriwati Djam'an, SE., M.Si.
NIP : 198008212 00501 2 002

pembimbing II

Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.
NIP : 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP: 19740715200212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN





Disusun dan diajukan oleh :

MUSLAEDI
A011181018

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 13 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fitriwati Djam'an, SE., M. Si	Ketua	1. 
2	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M. Si	Sekretaris	2. 
3	Drs. A. Baso Siswadharna, M. Si.	Anggota	3. 
4	Mirzalina Zaenal, SE., M. S.E	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muslaedi

Nomor Pokok : A0111813018

Program Studi : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang dipergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta Pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Muslaedi

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan**” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuatkan bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik.

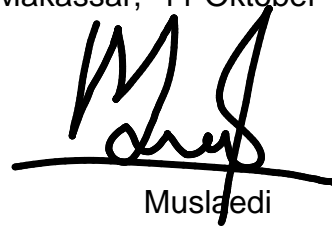
Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut :

1. Allah SWT. Atas kehendak dan karunia-Nya memberikan kemudahan serta kelancaran pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua penulis yaitu bapak Syamsuddin dan ibu Mari beserta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan support atau dukungan selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir perkuliahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M. Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M. Si. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
4. Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M. Si. selaku dosen penguji I dan Ibu Mirzalina Zaenal, SE., M. S.E selaku dosen penguji ke II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan serta terima kasih atas segala saran perbaikan dan pertanyaan-pertanyaan serta kritik yang membangun selama seminar proposal dan ujian skripsi dari hal-hal tersebut penulis banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu ILMU EKONOMI 2018 (KAWAN IE 2018), terima kasih atas setiap momen kebersamaan selama perkuliahan yang terjalin baik suka maupun duka.
6. Teman kuliah yaitu agung, farid, reski fausan, aksa, musmuliadi, syahrul nirmala dan ani terima kasih penulis ucapkan untuk kalian yang selalu menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, terima kasih telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi semoga kalian sehat selalu.
7. Kepada keluarga kakak ipar saipul s.pd, ardianto somba, SH. Dan juga terima kasih kepada sodara kandung nur ina, SE. dan

ismawati, SH. terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis, terimakasih atas segala bantuan, doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis terutama sejak penulisan skripsi.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Makassar, 11 Oktober 2022



Muslaedi

ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN

Muslaedi

Fitriwati djam'an

Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi secara simultan dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2010 sampai dengan 2019. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y1), dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) variabel independen yang digunakan adalah Kredit Umum (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kredit Umum secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMKM dan secara tidak langsung Kredit Umum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMKM melalui PDRB berpengaruh negative dan signifikan. Variabel Pengeluaran Pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan dan secara tidak langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja
UMKM, PDRB

ABSTRACT

DETERMINANT ANALYSIS OF LABOR ABSORPTION IN SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES (MSMEs) IN SOUTH SULAWESI

Muslaedi

Fitriwati djam'an

Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

This study aims to examine and analyze the Determinants of Labor Absorption in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sulawesi. The analytical method used in this research is simultaneous regression analysis using secondary data. The data collection in this study is through the Central Statistics Agency (BPS) in 2010 to 2019. The dependent variable used in this study is Gross Regional Domestic Product (PDRB) (Y1), and Labor Absorption (Y2) the independent variable used are General Credit (X1) and Government Expenditure (X2). The results of the study indicate that the General Credit variable directly has a positive and significant effect on MSME Workforce Absorption and indirectly General Credit on MSME Workforce Absorption through PDRB has a negative and significant effect. Government Expenditure variable directly has a positive and insignificant effect and indirectly Government Expenditure on Labor Absorption through GRDP has a positive and significant effect.

Keywords: General Credit, Government Expenditure, Employment of UMKM,
PDRB

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11
2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja	12
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.4 Kredit Umum	14
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.....	15
2.2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Dan penyerapan tenaga Kerja.....	15
2.3 Keterkaitan Antara Kredit Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja	16

2.4 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja	17
2.5 Penelitian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Konseptual Penelitian	19
2.7 Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Teknik Pengumpulan Data: Jenis dan Sumber Data.....	23
3.2 Metode Analisis Data	23
3.3 Definisi Operasional	25
3.3.1 Variabel Independen	25
3.3.2 Variabel Dependen.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	26
4.1.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Selayar	26
4.1.2 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bulukumba.....	27
4.1.3 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng	27
4.1.4 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto	28
4.1.5 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Takalar.....	28
4.1.6 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Gowa	29
4.1.7 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sinjai	30
4.1.8 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Maros.....	30

4.1.9	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pangkep	31
4.1.10	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Barru ..	31
4.1.11	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bone	32
4.1.12	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng	33
4.1.13	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Wajo	34
4.1.14	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sidrap	34
4.1.15	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pinrang	35
4.1.16	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Enrekang	36
4.1.17	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu	36
4.1.18	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Tanah Toraja	37
4.1.19	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Utara.....	37
4.1.20	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Timur	38
4.1.21	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Toraja Utara.....	38
4.1.22	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Makassar....	39
4.1.23	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Pare-Pare...	40
4.1.24	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Palopo.....	40
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian.....	41
4.2.1	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	41

4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	42
4.2.3 Perkembangan Kredit umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	44
4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan	45
4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, Terhadap PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja.	47
4.3.1 Pengaruh Kredit Umum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB	50
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB.	53
4.3.3 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ...	55
BAB V_KESIMPULAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2019.....	3
Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	6
Tabel 4.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja sektor UMKM 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam jiwa)	42
Tabel 4.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam triliun rupiah).....	44
Tabel 4.3 Perkembangan Kredit Umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam milyar rupiah)....	45
Tabel 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam triliun rupiah).....	47
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fungsi PDRB (Y1), Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja (Y2).....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir penelitian.....	23
Gambar 4.1 Hasil Estimasi.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sesuai pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mampu menjadi fondasi usaha kerakyatan yang memiliki potensi untuk diterapkan pada masa kini dan memiliki fungsi untuk menyeimbangkan dampak ekonomi global pada masyarakat. Perlu diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyerapan tenaga kerja dan dekat dengan rakyat kecil (Handayani, 2017). Terutama, masalah ketenagakerjaan sudah menjadi bagian integral dari masalah ekonomi, sehingga pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari masalah pembangunan ekonomi (Fatih, 2017).

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan seperti kakao, kopi, lada, padi, dan jagung. Berbagai upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM di Sulawesi Selatan diantaranya memberikan fasilitas peningkatan kualitas kemasan produk UMKM, sertifikasi produk pangan industri rumah tangga, pendaftaran produk UMKM, dan melaksanakan pelatihan vokasi untuk pengembangan UMKM. Sementara itu, kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi, dan pasar.

Berdasarkan hasil data survei IMK tahun 2019 jumlah UMKM yang diunggulkan di Sulawesi selatan tercatat 923.035 unit diantaranya industri makanan dengan presentase usaha sebanyak 41,24 persen, industri pakaian jadi dengan presentase usaha sebanyak 11,84 persen, dan industri tekstil dengan presentase usaha sebanyak 11,65. Dari hasil survei dapat dikatakan bahwa UMKM perlu didorong untuk lebih di tingkatkan untuk menyerap tenaga

kerja yang lebih banyak lagi dan mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya khususnya di Sulawesi Selatan.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, serta kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Tantangan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi, bukan permintaan pasar.

Tantangan berat dalam pengembangan UMKM dalam era perdagangan bebas dan persaingan global saat ini adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Ketatnya kompetisi di dunia usaha juga dirasakan oleh UMKM batik di tanah air. Tentunya intensitas kompetisi dalam industri ini, mewajibkan UMKM di tanah air untuk memiliki keunggulan produk dan kekhasan dari produk yang dihasilkan yang berkelanjutan agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. UMKM dan ekonomi kreatif dapat mendukung penyerapan tenaga kerja khususnya perempuan. Produk UMKM juga telah terbukti meningkatkan potensi budaya dan pariwisata Indonesia, sehingga turut menjaga kelestarian citra budaya daerah. disamping itu, di tengah gejolak ekonomi global, sektor UMKM dan produk kreatif juga relatif memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, UMKM diyakini dapat menjadi salah satu sektor penopang stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan (Todaro 2003). Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2003).

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. (Kuncoro, 2012).

Sedangkan Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda (Indayati, 2010 dkk).

Pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam kondisi saat sekarang, di negara berkembang kondisi pembangunan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan masalah cukup serius yang kita hadapi mengenai penyerapan tenaga kerja yang dimana pada akhirnya terjadi peningkatan pengangguran (Sukirno, 2013).

Dalam konsep Okun Law yang memberikan penjelasan hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Tujuan dari Okun Law adalah dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menekan tingginya tingkat pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk jangka panjang.

Penerapan Hukum Okun Law terhadap Indonesia dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Hukum Okun Law dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja atau berkurangnya tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini.

Tabel 1.1 Data Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Sulawesi Selatan Tahun 2010 - 2019

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Orang)	Perubahan Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Persen)	PDRB (Triliun Rupiah)	Perubahan Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2010	180,849	5,04	17,173,772	6,03
2011	220,180	17.86	18,668,589	8.01
2012	223,282	1.39	19,323,945	3.39
2013	243,053	8.13	21,782,056	11.29
2014	320,390	24.14	23,408,790	6.95
2015	245,464	-30.52	25,172,407	7.01
2016	253,922	3.33	27,061,467	6.98
2017	263,850	3.76	28,946,989	6.51
2018	208,257	-26.69	30,454,533	4.95
20 19	263,817	21.06	33,202,737	8.28

Sumber : Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tercatat di Tahun 2017-2018 terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja UMKM yang sangat tinggi hingga mencapai -26,69 persen disisi lain diiringi juga dengan penurunan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi 4,95 persen hingga pada Tahun 2019 jumlah tenaga kerja UMKM sudah terjadi peningkatan sebesar 21,06 persen akan tetapi peningkatan masih belum stabil karena masih ada selisih tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja pada Tahun 2018 yang lalu. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami penurunan sebesar 8,28 persen sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kembali pada tahun yang akan datang.

Masalah yang muncul pada tabel 1.1 yaitu terjadi pada Tahun 2018 yang lalu dimana menurut data jumlah tenaga kerja UMKM yang terserap di Sulawesi Selatan hingga mencapai -26,69 persen yang diakibatkan Sulawesi Selatan mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor jasa yang minim menyerap tenaga kerja disektor UMKM, sehingga jika pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan maka akan berdampak semakin bertambahnya tingkat pengangguran karena banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja. Bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan adanya kesenjangan antara permintaan tenaga kerja dengan lapangan kerja, ditambah minimnya informasi lapangan kerja. Ada beberapa faktor pemicu pengangguran diantaranya dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kenaikan UMK menekan pelaku industri yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, pengangguran juga disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.

Hingga pada Tahun 2019 jumlah tenaga kerja UMKM sudah terjadi peningkatan sebesar 21,06 persen akan tetapi peningkatan jumlah tenaga kerja UMKM ini masih belum stabil karena masih ada selisih tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja pada Tahun 2018 yang lalu. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami penurunan sebesar 8,28 persen sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kembali pada tahun yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja mempunyai berpengaruh positif karena di Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun jumlah tenaga kerja malah mengalami fluktuasi.

Peningkatan jumlah tenaga kerja menjadi kontribusi naiknya pertumbuhan ekonomi. ketika pertumbuhan ekonomi naik maka jumlah tenaga kerja yang terserap ke usaha mikro kecil dan menengah juga naik. Akan tetapi tenaga kerja yang belum mampu memenuhi angkatan kerja berdampak pada penambahan jumlah pengangguran salah satu faktor yang mempengaruhi tenaga kerja yang menurun adalah disebabkan oleh rendahnya produktifitas dari para pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (Putri, 2018).

Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Sulawesi Selatan Tahun 2010 - 2019

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (Orang)	Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (Persen)
2010	35.692	-21.45
2011	38.838	8.10
2012	56.436	31.18
2013	56.986	0.97
2014	57.450	0.81
2015	49.346	-16.42
2016	57.245	13.80
2017	45.737	-25.16
2018	47.241	3.18
2019	40.232	-17.42

Sumber : Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari tabel 1.2 tercatat di Tahun 2010, 2015, 2017, dan 2019 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja UMKM yang sangat tinggi. Jumlah tenaga kerja sektor industri sudah terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebesar 31,18 persen akan tetapi hanya terjadi pada tahun 2013. Peningkatan masih belum stabil karena masih banyak tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja pada sektor industri. yang diakibatkan Sulawesi Selatan mengandalkan sektor jasa yang minim menyerap tenaga kerja disektor industri, sehingga semakin bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan adanya kesenjangan antara permintaan tenaga kerja dengan lapangan kerja, ditambah minimnya informasi lapangan kerja.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dengan membandingkan jumlah tenaga kerja UMKM dan jumlah tenaga kerja sektro industri di Sulawesi Sselatan pada tahun 2010-2019 dapat di ketahui bahwa yang banyak menyerap tenaga kerja berdasarkan pada data adalah tenaga kerja umkm di bandingkan dengan sektor industri yang di akibatkan pada sektor industri jumlah usaha yang tidak banyak sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja kemudian pada sektor industri

perekrutan karyawan selalu mengandalkan keterampilan atau, latar belakang pendidikan sehingga sektor industri tidak banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan UMKM yang terfokus untuk lebih mengutamakan masyarakat golongan kebawah dimana dengan semakin banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dan juga umkm tidak terlalu mengandalkan keterampilan dan latar belakang pendidikan sehingga UMKM butuh perhatian yang lebih oleh pemerintah untuk lebih dikembangkan lagi kedepannya untuk membantu masyarakat golongan kebawah untuk mendapatkan pekerjaan khususnya di Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan di tempat atau mengalami kemunduran. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; modal (investasi dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar keuangan. Modal ini yang akan membantu proses produksi, sehingga akan menghasilkan barang dan jasa yang tentunya dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya. Investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan khususnya pada sektor UMKM. Banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Modal bagi UMKM menjadi penting, sebab seringkali mendapatkan peluang usaha yang cukup besar. Namun, kondisi permodalan yang minim membuat UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Akses ke sumber permodalan membutuhkan jaminan, aspek legalitas, pencatatan

keuangan yang rapi dan rencana bisnis yang profesional, membuat pelaku UMKM yang umumnya berpendidikan rendah kesulitan dalam memenuhinya, sehingga peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam memberikan kemudahan pada akses kredit dan pendampingan usaha sangat di perlukan. Oleh karena itu perlu adanya upaya mengatasi masalah UMKM dalam pemenuhan modal. Salah satunya pemerintah mulai mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata. Program KUR ini ditujukan bagi kelompok-kelompok UMKM di Indonesia. Objek-objek yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan pembiayaan Kredit Mikro yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang berada di Indonesia pada sektor ekonomi untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya, yang diharapkan setelah UMKM mengalami peningkatan maka akan berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor UMKM yang akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa peningkatan dalam penyaluran kredit berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian dalam beberapa tahun terakhir menemukan bahwa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi kredit produktif yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bezemer, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memerlukan tenaga kerja tambahan sebagai faktor produksi untuk memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Kondisi seperti ini terutama akan terjadi pada struktur perekonomian yang memiliki corak padat karya (*Labour Intensive*). Apabila struktur perekonomian suatu wilayah adalah padat modal (*Capital Intensive*), maka pertumbuhan ekonomi hanya akan meningkatkan kebutuhan modal dan tidak akan menyerap banyak tenaga kerja (Maulia, 2014)

Daya serap tenaga kerja merupakan suatu model permintaan suatu unit usaha terhadap tenaga kerja dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku. Tingkat upah yang berlaku ini juga mempengaruhi kekuatan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja dari pasar. Kekuatan terhadap permintaan tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal dari usaha tersebut (Chusnah, 2013).

Semakin sempit daya serap sektor moderen terhadap perluasan kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional menjadi tempat

penampungan angkatan kerja. Lapangan kerja terbesar yang dimiliki Indonesia berada pada sektor informal. Hal ini disebabkan sektor informal mudah dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian, dan keterampilan (Chusnah, 2013).

Analisis penyerapan pekerja di sektor industri dapat didekati melalui teori permintaan tenaga kerja. (*Derived Demand*) dari perubahan permintaan konsumen terhadap output perusahaan. Perusahaan menyewa tenaga kerja bukan untuk dikonsumsi langsung, tetapi digunakan untuk memproduksi, maka penambahan kemampuan pengusaha menyerap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan terhadap barang yang diproduksinya (Simanjuntak, 1985).

Sebagai negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi salah satunya yaitu melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 2002). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah

yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Alkadri 2009).

Untuk menanggulangi masalah penyerapan tenaga kerja harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional. Program yang dipilih harus berpihak kepada pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta diiringi semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Salah satu penguatan pertumbuhan ekonomi yaitu pemerintah perlu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana para pelaku UMKM dimudahkan untuk mengambil kredit yang berguna untuk pengembangan usaha-usahanya.

Dengan adanya langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung untuk pengembangan UMKM yang berguna memperluas akses masyarakat miskin untuk memasuki pasar kerja, menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis determinan penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang masih ada hubungannya dengan permasalahan ini.
 - b. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan masalah-masalah penyerapan tenaga kerja
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah dan strategi-strategi untuk mengembangkan lebih lanjut lagi pada sektor industri kecil dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM). Umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap (Tulus Tambunan, 2012)

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,-.

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki

hasil penjualan tahunan dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000,-.

Usaha mikro dan kecil menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Pada perekonomian nasional dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai PDB, Salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.

Adapun tujuan lain yaitu pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan Kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi sistem usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. (Todaro, 2003).

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja atau di pekerjakan oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). (Kuncoro, 2002).

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. (Kuncoro, 2012). Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda (Indayati, 2010).

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam kondisi saat sekarang, di negara berkembang kondisi pembangunan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan masalah cukup serius yang kita hadapi mengenai penyerapan tenaga kerja yang dimana pada akhirnya terjadi peningkatan pengangguran (Sukirno, 2013).

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Adapun perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya, dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Basri, 2010).

Fenomena pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti, karena ada negara atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga tinggi.

Keadaan tersebut menjadi pemicu munculnya Hukum Okun yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun dalam Okun's Law. Hukum Okun menggambarkan, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah berbanding terbalik (negative), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan (Mayra Astari, 2019).

Dalam konsep Okun Law yang memberikan penjelasan hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Tujuan dari Okun Law adalah dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menekan tingginya tingkat pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk jangka panjang.

2.1.4 Kredit Umum

Pengertian kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Kasmir 2016).

kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit (Ismail. 2010).

Secara umum kredit dapat dilihat dari segi kegunaan biasa digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin dengan masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Kemudian dapat juga di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kemudian dapat juga digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi atau bisa juga disebut kredit produktif. Kredit ini diberikan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian

akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa (Sukirno, 2010).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, pengeluaran pemerintah bersifat (*Exhaustive*) yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Disamping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (Suparmoko, 2004).

2.2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Dan penyerapan tenaga Kerja

Fenomena pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti, karena ada negara atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga tinggi. Keadaan tersebut menjadi pemicu munculnya Hukum Okun yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun dalam Okun's Law. Hukum Okun menggambarkan, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah berbanding terbalik (*negative*), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan (Mayra Astari, 2019).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut

ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (Adinda Putri Haspari, 2018).

Keterkaitan antara Pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja (Suparta, 2014).

2.3 Keterkaitan Antara Kredit Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika kredit konsumsi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kredit konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan penyaluran kredit ini bertujuan untuk konsumtif, kredit konsumsi ini ditujukan untuk individu atau perorangan dan kelompok bukan untuk kegiatan usaha tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang konsumtif. Kredit konsumsi setiap tahun mengalami peningkatan terutama digunakan oleh masyarakat untuk kredit rumah/apartemen dan kredit kendaraan bermotor (khairuna 2018).

berdasarkan hasil penelitian Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kredit perbankan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kredit perbankan sektor industri sebesar 84,2% di

Provinsi Jambi pada tahun 2006-2015. Usaha mencapai tujuan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi, perbankan memegang peranan yang sangat penting menjadi suatu badan yang dapat menunjang pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengambilan kredit yang berguna untuk menambah alat-alat produksi yang berguna untuk meningkatkan usaha perusahaan maka perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja salah satunya adalah sektor industri. Pembangunan pada sektor industri merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju. Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, perluasan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja sebagai langkah agar terpenuhinya tujuan nasional yaitu kemakmuran rakyat (Hasan Basri 2018).

2.4 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Menurut Djunasien dan Hidayat, (2002) Pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi hasil penelitian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang mengatakan pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang salah satunya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output dalam jangka panjang.

Menurut Rosen, (2014); Sukirno, (2013) pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Pengeluaran

pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Galang Kanigara Jagaditha dan Gusti Wayan Murjana (2020) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali 2015-2019. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan langsung maupun tidak langsung dalam mengatur jalannya perekonomian. Melalui pengeluaran pemerintah maka output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi akan semakin besar. Disamping itu pula, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan akan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Dalam meningkatkan output produksi, produsen akan memerlukan tambahan input produksi salah satunya adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja. Ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, maka penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah faktor produksi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Achma Hendra Setiawan 2007 “ analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang” yang menyatakan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai output memiliki pengaruh yang paling kecil diantara variabel yang lain.

Siti Syuhada, Aulia Tasman, Hardiani (2014) “faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi” yang mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro di Kota Jambi dipengaruhi oleh upah riil dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kota Jambi di pengaruhi oleh upah riil dan suku bunga riil.

Zulkarnain Nasution (2018) “analisis investasi, PAD dan jumlah unit UKM terhadap penyerapan tenaga kerja UKM di Kabupaten Labuhan Batu” yang

mengatakan bahwa secara simultan investasi UKM, PAD dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun 2007 sampai 2016 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Diwayana Putri Nasution, Annisa Ilmi Faried, Aldi Agustino (2020) “analisis determinan penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia” yang mengatakan bahwa berdasarkan variabel upah minimum (UM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PNG (Pengangguran). Untuk variabel JP (Jumlah Penduduk) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PNG (Pengangguran). sedangkan variabel PTK (Penyerapan Tenaga Kerja) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PNG (Pengangguran) dan untuk variabel PDB (Produk Domestik Bruto UMKM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja). variabel UMKM (Jumlah UMKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja), sedangkan investasi (Investasi UMKM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja). variabel PNG (Pengangguran) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja).

Amin Budiawan (2013) “faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak” yang mengatakan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak adalah upah tenaga kerja karena dari uji parsial menunjukkan bahwa nilai upah berkontribusi lebih besar.

2.6 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kredit perbankan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kredit perbankan sektor industri sebesar 84,2% di Provinsi Jambi pada tahun 2006-2015. Peranan perbankan sebenarnya adalah sebagai sektor penunjang, yang berperan memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai lembaga pengumpulan dana dalam masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan mengambil kegiatan dan menunjang perekonomian masyarakat, yaitu dalam rangka pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan tercapai bila masyarakat luas diberi kesempatan berusaha secara lebih layak (Hasan Basri 2018).

Keterkaitan kredit berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi hanya terlihat di negara-negara dengan tingkat pembangunan yang telah mencapai level yang cukup baik. Pada tingkat individu bank, bank akan mendorong intermediasi finansial secara optimal dengan memberikan suku bunga kredit yang lebih kompetitif, apabila manajemen bank telah mencapai tingkat efisiensi biaya tertentu dalam memperoleh dan mengolah informasi dari debitur secara berkala (Bose dan Cothren, 1996; 1997).

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 2002:90). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013).

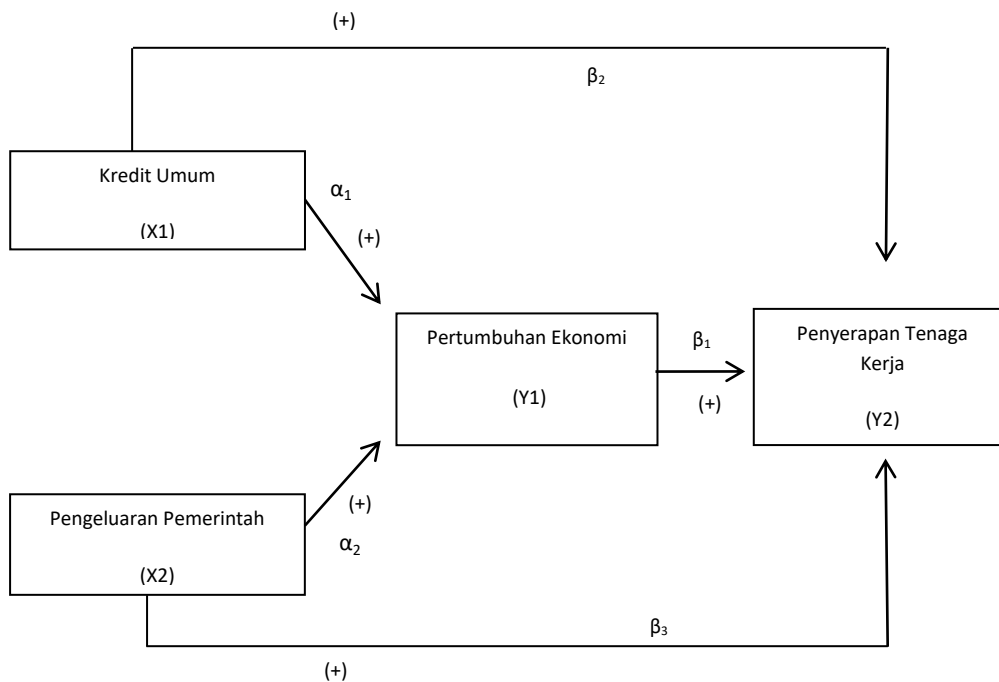
Keterkaitan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi

untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Al-Shatti 2014) dan (Shivaranjani 2010) bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga di tunjukkan dari studi (Gemmel, dkk 2012), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal demikian mengindikasikan mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur di perlukan dalam mendukung proses pembangunan daerah ataupun negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan antara Pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja (Suparta, 2014).

Sehubungan dengan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian ini sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir penelitian



2.7 Hipotesis

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat pengaruh kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usana mikro kecil dan menengah baik secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga terdapat pengaruh langsung (positif) pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.